

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* – yang menjadi titik tekan paradigma tradisional – dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma *New Public Management* (NPM). Dalam konsep *government*, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik (Pratikno, 2004). *Governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta (Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2003).

Pengungkapan informasi keuangan dewasa ini sangat penting bagi perusahaan publik. Pengungkapan laporan keuangan kepada publik dimaksudkan sebagai alat akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan tersebut kepada para pengguna informasi keuangan.

Pada saat sekarang ini pengguna informasi keuangan tidak hanya berasal dari para investor perusahaan swasta saja. Dalam sektor pemerintahan pengungkapan laporan keuangan juga perlu digunakan untuk memberikan informasi pada publik. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu tranparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas terhadap publik. Oleh karena itu baik perusahaan swasta maupun organisasi nirlaba harus memandang

good governance bukan sebagai suatu kata-kata saja, namun harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan atau instansi tersebut. (Tjager, 2003)

Pada sektor swasta, isu *good governance* menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi prinsip tersebut. Dalam sektor swasta, *good corporate governance* menjadi bagian dari manajemen dan karakter suatu perusahaan. Perusahaan lebih berorientasi pada kepuasan dan perlindungan terhadap konsumen, selain efisiensi dan manajemen yang transparan.

Penerapan *good governance* pada organisasi non-profit juga menjadi hal yang penting. Walaupun wacana atau tuntutan akan *good governance* tidak sekuat pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi non-profit berasal dari para donator-donatur organisasi tersebut.

Menurut *World Bank* Organisasi nirlaba baik LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun *NGO (Non-Governmental Organization)* adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.

Salah satu yang menjadi persoalan bagi *NGO* dewasa ini adalah keberlanjutan dari organisasi tersebut. Persoalan ini muncul karena sumber pemasukkan *NGO* berasal dari donasi-donasi para donator (*funder*). Hal ini terjadi karena *NGO* masih bergantung pada hibah dan hutang luar negeri. Penelitian Ibrahim (2000) pada 25 organisasi sedikit menggambarkan komposisi

ini. Meskipun, perlu dicatat di sini, responden yang disurvei adalah organisasi yang masuk dalam kategori Organisasi Sumber daya Sipil (OSMS), dan bukan sepenuhnya LSM. Karenanya data yang tersedia ini lebih menggambarkan sumber dana yang diterima oleh organisasi OSMS dan LSM maupun lembaga dana. Dari penelitian ini terlihat mayoritas masih mengandalkan sumber bantuan luar negeri yang mencapai 65%, dan sumber dalam negeri 35%. Secara lebih terinci sumber dalam negeri terutama adalah hasil usaha sendiri (33%), sumbangan perusahaan dan dana abadi (masing-masing 17%). Donasi individual menyumbang 14%. Sisanya dalam jumlah lebih kecil bersumber dari pemerintah (5%) dan sumbangan Ornop (3%), Dan sumber lainnya (11%). Sementara itu dalam beberapa tahun ini, ada kecenderungan aliran hibah itu berkurang. Sebabnya antara lain, situasi dunia yang terus berubah ikut mempengaruhi skala prioritas donator. Karena itu kalangan LSM/*NGO* perlu mulai menggalang dana alternatif, yang bukan sama sekali tidak ada, tetapi kontribusinya masih sangat kecil. Sumber alternatif ini beragam dari sumbangan perorangan sampai penjualan produk dan jasa yang terkait dengan misi lembaga¹.

Dari masalah sumber pendanaan tersebut munculah tuntutan mengenai transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari good [governance](#). Tata kelola yang baik dapat dicapai suatu organisasi jika organisasi tersebut menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip tersebut antara lain adalah akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat.

¹ Zaim Saidi: “Lima Persoalan Mendasar Akuntabilitas LSM ”

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah dalam hal ini organisasi nirlaba untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah atau dalam hal ini adalah para donator (*principal*). Sedangkan transparansi dibangun untuk memberikan kebebasan kepada pengguna informasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam hal ini oleh para donator. Partisipasi masyarakat memberikan kebebasan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya organisasi tersebut.

Terkait dengan sistem akuntabilitas publik, praktik akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba tersebut memerlukan dukungan sistem akuntansi yang memadai. Selain kewajiban dokumentasi keuangan, dalam membuat ikhtisar laporan tahunan juga telah ditentukan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan bagi organisasi nirlaba tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45).

Untuk mencapai sebuah *good governance* organisasi nirlaba harus dilakukan dengan akuntabel, transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan terciptanya tata kelola organisasi nirlaba yang bagus maka lingkungan organisasi akan menjadi baik sehingga keselarasan tujuan antara *agent* dan *principal* sama-sama tercapai. Hasil dari tata kelola yang baik di organisasi nirlaba akan membuat para donatur merasa yakin atas tanggung jawab yang diberikan kepada organisasi tersebut sehingga pemberian donasi akan berlangsung lebih baik lagi.

Keselarasan tujuan antara agent dan principal akan membuat organisasi mengurangi konflik yang terjadi. Untuk mengurangi konflik yang terjadi ini, organisasi diminta untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola yang baik dibutuhkan organisasi guna menjaga kelangsungan organisasi tersebut. Dalam faktanya banyak organisasi nirlaba yang belum menjalankan prinsip tata kelola yang baik sehingga banyak dari LSM, yayasan maupun organisasi lainnya kehilangan kepercayaan. Dampak dari kehilangan kepercayaan oleh *funder* membuat banyak organisasi nirlaba tidak berumur panjang karena kehilangan sumber pendanaannya.

Terkait dengan hal tersebut semua, sudah sewajarnya organisasi nirlaba menerapkan *good governance* dalam kehidupan organisasinya. Hal ini akan membantu organisasi dalam memperoleh kepercayaan dari pendonor dana.

Oleh karena itu dari penjelasan yang sudah dijabarkan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui **“Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu

dan seberapa besar efisiensi proses yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.

Good governance dalam sektor privat atau swasta sudah banyak digunakan dan menjadi hal wajib bagi suatu perusahaan untuk menggunakan tata kelola yang baik. Dalam sektor publik penggunaan *good governance* belumlah menjadi hal yang wajib. Banyak dari organisasi-organisasi non-profit belum menggunakan hal ini karena mereka berpikir tanggung jawabnya hanya kepada pemberi hibah atau pendonor saja. Banyak organisasi non-profit yang tidak bertahan lama umurnya. Masalah tersebut muncul karena pendonor kehilangan kepercayaan yang diakibatkan tata kelola yang buruk dari organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Nirlaba?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Nirlaba?
3. Apakah Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Nirlaba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pada organisasi nirlaba.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pada organisasi nirlaba.

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap kinerja pada organisasi nirlaba.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk Organisasi Nirlaba. Penelitian ini dapat membantu organisasi nirlaba untuk membuat tata kelola organisasinya menjadi lebih baik dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.
2. Untuk Donatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk para donator untuk lebih bijak dalam mendonasikan dananya.
3. Untuk peneliti selanjutnya. Sebagai acuan untuk mengembangkan *good governance* di sektor publik.